

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA
(Studi Kasus di Desa Margototo dan Desa Margosari, Kecamatan Metro
Kibang, Kabupaten Lampung Timur)**

(SKRIPSI)

Oleh

**ZACKY MAULADIN ARYADZIKARA
2016021018**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Margototo dan Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

ZACKY MAULADIN ARYADZIKARA

Ketidaksesuaian anggaran keuangan dengan volume kegiatan terlaksana di Desa Margosari dan Margototo sejalan dengan problematika korupsi dana desa di Indonesia yang angkanya terus meningkat. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana penerapan aplikasi SISKEUDES terhadap akuntabilitas keuangan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aplikasi SISKEUDES terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas oleh Rizal Djalil yaitu meliputi indikator integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif melibatkan data primer dan data sekunder melalui proses observasi dan wawancara mendalam terhadap pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat desa di kedua Desa Margototo dan Margosari dan didukung pula dengan dokumentasi pendukungnya.

Hasil penelitian, aspek integritas keuangan terlaksana optimal dengan SISKEUDES yang memudahkan aparat melakukan pencatatan keuangan. Aspek pengungkapan belum optimal karena keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan belum teratasi oleh SISKEUDES. Aspek ketaatan optimal, dengan penerapan SISKEUDES yang mendorong pengelolaan yang tertib administrasi dan patuh hukum. Aplikasi ini belum optimal dalam penerapan asas transparansi karena informasi keuangan belum terbuka kepada masyarakat. Asas partisipatif belum optimal, ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat. Asas akuntabel belum optimal karena proses masih manual dengan tingkat partisipasi rendah. Penerapan asas tertib berjalan optimal, dengan SISKEUDES memastikan pengelolaan keuangan sesuai peraturan dan meningkatkan kepatuhan administratif. Namun, disiplin anggaran belum optimal, terlihat dari adanya selisih antara anggaran yang direncanakan dan realisasi meskipun menggunakan SISKEUDES.

Kata Kunci : SISKEUDES, Akuntabilitas, Keuangan Desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF VILLAGE FINANCIAL SYSTEM APPLICATION IN REALISING VILLAGE FINANCIAL ACCOUNTABILITY (Case Study in Margototo Village and Margosari Village, Metro Kibang District, East Lampung Regency)

By

ZACKY MAULADIN ARYADZIKARA

The mismatch between the financial budget and the volume of activities carried out in Margosari and Margototo Villages is in line with the problem of corruption of village funds in Indonesia, whose numbers continue to increase. This raises the question of how the application of SISKEUDES application on village financial accountability. The purpose of this study was to determine the application of the SISKEUDES application to village financial accountability. This study uses the theory of accountability by Rizal Djalil, which includes indicators of financial integrity, disclosure, and compliance. The method used is descriptive qualitative method involving primary data and secondary data through the process of observation and in-depth interviews with the village government, Village Consultative Body and village community in both Margototo and Margosari Villages and supported by supporting documentation. The results of the study show that the financial integrity aspect is optimised by SISKEUDES, which makes it easier for officials to record finances. The disclosure aspect is not optimal because limited public access to financial information has not been resolved by SISKEUDES. The aspect of compliance is optimal, with the application of SISKEUDES that encourages orderly administrative and law-abiding management. This application has not been optimal in applying the principle of transparency because financial information has not been open to the community. The participatory principle is not optimal, characterised by low community participation. The principle of accountability is not yet optimal because the process is still manual with a low level of participation. The implementation of the principle of order is optimal, with SISKEUDES ensuring financial management according to regulations and improving administrative compliance. However, budget discipline is not yet optimal, as seen from the difference between the planned and realised budgets despite using SISKEUDES.

Keywords: SISKEUDES, Accountability, Village Finance

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA
(Studi Kasus di Desa Margototo dan Desa Margosari, Kecamatan Metro
Kibang, Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh

ZACKY MAULADIN ARYADZIKARA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Margototo dan Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : **Zacky Mauladin Aryadzikara**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016021018**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Darmawan Purba, S.IP., M.IP
NIP. 198106012010121003


Kris Ari Suryandari, S.IP.,M.IP
NIP. 199009182024212001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

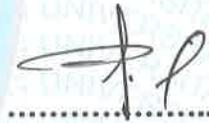
Ketua : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP**



Sekretaris : **Kris Ari Suryandari, S.IP.,M.I.P**



Penguji : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **17 Juli 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



Zacky Mauladin Aryadzikara
NPM. 2016021018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Zacky Mauladin Aryadzikara dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 Maret 2002 yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putra dari Bapak Kamaluddin dan Ibu Mufrikhah.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Amalia pada tahun 2007-2008, dilanjutkan di SDN 3 Perumnas Way Kandis pada tahun 2008-2014. Setelah lulus SD, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 19 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Bandar Lampung pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2020.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila penulis mengikuti berbagai kegiatan kampus baik akademik maupun non akademik dalam mengasah *skill* diri Penulis. Penulis bergabung pada Unit Kegiatan Mahasiswa FSPI pada tahun 2020. Selanjutnya Penulis memutuskan bergabung pada Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan sebagai Sekretaris Biro 1 Kajian dan Keilmuan pada periode 2022. Kemudian selepas demisioner di Himpunan penulis meneruskan kegiatan organisasi di organisasi BEM FISIP sebagai wakil gubernur. Pada saat menjadi mahasiswa Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Desa Kalisari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya Penulis ikut serta dalam kegiatan penelitian di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Desa Margosari, Metro Kibang, Lampung Timur.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”

(Q.S Ar-Ra'd :11)

“Lebih baik menyesali sesuatu yang telah saya lakukan daripada sesuatu yang tidak saya lakukan”

(Lucille Ball)

“Pola pikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, dan karakter akan merubah kenyataan.”

(Marchel Radhival)

“Tuhan memberimu berbagai kesulitan maupun ujian bukan sebagai penghambat dirimu, melainkan itu cara-Nya untuk memantaskan dirimu menggapai apa yang kamu impikan.”

(Zacky Mauladin Aryadzikara)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga kelak karya ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat

Karya Tulis ini khusus saya persembahkan kepada:

Ayah dan Mamah tercinta

Kamaluddin dan Mufrikhah

Terima kasih atas segala dukungan, semangat, kesabaran, cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan pengorbanan serta do'a yang telah menghantarkan saya menuju gerbang kesuksesan.

Terima kasih untuk semua yang telah mendoakan dan mendukung Penulis selama ini, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Almamater yang penulis banggakan

“Universitas Lampung”

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul **“Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Margototo dan Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur).”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT yang membawa petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Margototo dan Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur)”** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan skripsi ini. Selesainya skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui sanwacana ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ayah dan Mamah yang selalu memberikan dukungan, semangat, kesabaran, cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan pengorbanan serta do'a yang telah menghantarkan anaknya menuju gerbang kesuksesan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, kebahagiaan serta mewujudkan impian kalian dan membalas segala kebaikan Ayah dan Mamah.

2. Kepada Kakak dan Adik Penulis, Tete Kamelia Tsany dan Adikku Abdi Salim Mubarak & Hanif Aqil Akhdani terima kasih sudah kebersamaian penulis dalam tumbuh dan berkembang di dunia ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan melimpahkan keberkahannya.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, terima kasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP & Ibu Kris Ari Suryandari, S.IP., M.IP, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu yang senantiasa meluangkan waktu dan ilmunya serta memberi bimbingan, kritik, saran dan masukannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian.
5. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., selaku Dosen Pembahas yang senantiasa meluangkan waktunya memberi bimbingan, kritik, saran dan masukannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas segala kebaikan Bapak.
6. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama jenjang perkuliahan penulis.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman dan ilmu yang telah diberikan.
8. Kepada Risvania Nisa Nur Lativa, saya ucapkan terima kasih banyak sudah banyak menemani dan membantu Penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih juga telah menjadi pendengar baik ketika penulis berkeluh kesah, menjadi penghibur ketika penulis sedang sedih dan tidak bersemangat dan menjadi *partner* berdiskusi atas segala hal. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, melimpahkan keberkahan dan memberikan kebahagiaan serta kesuksesan kepadamu.
9. Kepada Sahabat Penulis "*The Javanance*", Efrildo Zalerico Farkaroni, Diska Amanda Hamidi, M. Arya Maulana, Bregito Firgiawan dan Garis Adisty

Grafito terima kasih telah merangkul Penulis sehingga masa perkuliahan saya lebih berwarna.

10. Kepada teman-teman angkatan 20 SOSPOL, Ramadhan, Efrildo, Diska, Rayhan, Rafly, Fariko, Yulisa, Ainun, Sabil, Husen yang memberi banyak bumbu cerita kehidupan, pengalaman, senang duka dalam berhimpun, sehingga banyak pelajaran yang penulis petik dari hal tersebut.
11. Kepada keluarga HmI SOSPOL, Bang Edo, Bang Alex, Bang Awan, Bang Hayatami, Bang Harjuno, Bang Tio, Bang Nando, Bang Arben, Bang Muarif, Bang Nendi, Bang Kepin, Bang Fadil, Bang Ibor, Bang Aldy serta adik-adik komisariat yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menjadi bagian hidup Penulis, terima kasih atas banyaknya pengalaman dan pembelajaran yang membentuk pribadi Penulis jadi lebih berkembang.
12. Kepada teman-teman seperjuangan MBKM Penelitian, Diska, Ramadhan, Rayhan, Tegas, Reka, Novika, Aderia, Sri, Yulisa. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya serta kebersamaan dalam suka duka selama menjalankan MBKM Penelitian di Desa Margototo & Margosari.
13. Kepada Teman-teman (Moron), Yoan, Erby, Gheandaru, Fahri, Fajar, Ashabul,dan Hapis, terima kasih telah menjadi bagian dari hidup penulis dari masa-masa SMA hingga bangku perkuliahan.
14. Kepada rekan-rekan HMJ Ilmu Pemerintahan, Bang restu, Mbak Wenti, Mbak Agnes, Mbak Roro, Bang Farhan, Bang Ayandra, Mbak Cindy, Mbak Erika, Pito, Sri yang memberi banyak pengalaman dan pembelajaran semasa perkuliahan.
15. Kepada teman-teman “KKN Desa Kalisari 2023”, Fajar Eka Setiawan, Yudha Setiawan, Risvania Nisa Nur Lativa, Dara Arifa H, Rahma Aulia J, Hilalliah Fitri, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang sangat berkesan bagi Penulis. Banyak kisah yang sangat berkesan dan pembelajaran hidup yang di dapat Penulis, semoga kita semua dapat selalu berkumpul hingga tua dengan kisah suksesnya masing-masing.
16. Kepada seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020 yang juga telah memberi kesan dalam bangku perkuliahan. Semoga kita semua dapat menggapai kesuksesan seperti yang diangankan.

17. Kepada rekan-rekan BEM FISIP periode 2023, Rafi, Diska, Octa, Ramadhan, Dinda, Ayub, Branden, Rais, Biya, Septa, Raihan, Rafly, Alisha (Nday), Nico, Dela serta segenap staff BEM, terima kasih telah kebersamai Penulis dalam menjalankan 1 tahun kepengurusan BEM FISIP, semoga niat baik rekan semua menjadi amal bagi kita semua.
18. Kepada Informan penelitian, Bapak Al Qomarudin, Bapak Antono, Ibu Rohani, Bapak Tumiran, Bapak Jumawan, Bapak Suwardi, Bapak Suranto, Mbak Ulfa, Bapak Purwanto, dan Bapak Aris.
19. Kepada Bapak Suwardi dan Bapak Suranto serta segala aparatur Desa Margosari lainnya yang tidak dapat disebutkan semua, terima kasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
20. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024
Penulis,

Zacky Mauladin Aryadzikara

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Sistem Keuangan Desa	12
2.1.1 Definisi Sistem Keuangan Desa.....	12
2.1.2 Keunggulan Sistem Keuangan Desa	14
2.1.3 Penggunaan Aplikasi SISKEUDES	15
2.2 Tinjauan Akuntabilitas	25
2.3.1 Definisi Akuntabilitas	25
2.3.2 Indikator Akuntabilitas.....	26
2.3.3 Fungsi Akuntabilitas	27
2.3 Tinjauan Keuangan Desa.....	28
2.3.1 Pengertian Keuangan Desa	28
2.3.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	29
2.2 Kerangka Pikir.....	30
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian	32
3.2 Fokus Penelitian.....	32
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Informan Penelitian	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36

3.7	Teknik Pengolahan Data	38
3.8	Teknik Analisis Data	39
3.9	Teknik Validasi Data	40
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1	Gambaran Umum	42
4.1.1	Desa Margototo	42
4.1.2	Desa Margosari	44
4.1.3	Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	47
4.2	Hasil	49
4.2.1	Desa Margototo	50
4.2.1.1	Integritas Keuangan	50
4.2.1.2	Pengungkapan	57
4.2.1.3	Ketaatan	63
4.2.2	Desa Margosari	68
4.2.2.1	Integritas Keuangan	68
4.2.2.2	Pengungkapan	73
4.2.2.3	Ketaatan	78
4.3	Pembahasan	82
4.3.1.	Perbandingan Kondisi Akuntabilitas Keuangan di Desa Margototo dan Margosari dari Aspek Integritas Keuangan	83
4.3.2.	Perbandingan Kondisi Akuntabilitas Keuangan di Desa Margototo dan Margosari dari Aspek Pengungkapan	85
4.3.3.	Perbandingan Kondisi Akuntabilitas Keuangan di Desa Margototo dan Margosari dari Aspek Ketaatan	87
4.3.4.	Kondisi Akuntabilitas Keuangan di Desa Margototo dan Margosari	89
4.3.5.	Pengelolaan Keuangan Desa di Tinjau dari Asas Permendagri No 20 Tahun 2018	90
V.	SIMPULAN DAN SARAN	100
5.1	Simpulan	100
5.2	Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	102
	LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Dana Kelolaan Desa Margototo Tahun 2022.....	2
2. Dana Kelolaan Desa Margosari Tahun 2022	2
3. APBDes Margototo Tahun 2022.....	6
4. APBDes Margosari Tahun 2022	7
5. Pembangunan Desa Margototo Tahun 2022	8
6. Pembangunan Desa Margosari Tahun 2022	8
7. Penelitian Terdahulu	9
8. Informan Penelitian Desa Margototo	35
9. Informan Penelitian Desa Margosari	35
10. Sebaran Mata Pencaharian Penduduk Desa Margototo	43
11. Pengelompokan Tingkat Pendidikan Desa Margototo.....	43
12. Struktur Pemerintahan Desa Margototo.....	44
13. Luas Lahan Desa Margototo	44
14. Sebaran Mata Pencaharian Penduduk Desa Margosari.....	46
15. Pengelompokan Tingkat Pendidikan Desa Margosari	46
16. Luas Lahan Desa Margosari	47
17. Struktur Pemerintahan Desa Margosari	47
18. Kondisi Akuntabilitas Desa Margototo dan Desa Margosari Menggunakan SISKEUDES	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kasus Korupsi Dana Desa Paska UU No. 6 Tahun 2014	5
2. Tampilan Aplikasi Siskeudes	15
3. Tampilan Aplikasi Siskeudes	16
4. Tampilan Aplikasi Siskeudes	17
5. Tampilan Aplikasi Siskeudes	18
6. Tampilan Aplikasi Siskeudes	19
7. Tampilan Aplikasi Siskeudes	20
8. Tampilan Aplikasi Siskeudes	21
9. Tampilan Aplikasi Siskeudes	22
10. Tampilan Aplikasi Siskeudes	22
11. Tampilan Aplikasi Siskeudes	23
12. Tampilan Aplikasi Siskeudes	24
13. Kerangka Pikir	31
14. Teknik Validasi Data Sumber dan Teknik	41
15. Denah Desa Margototo	42
16. Denah Desa Margosari	45
17. Struktur Pengelolaan Keuangan Melalui SISKEUDES	49
18. SPP Pelaksanaan Kegiatan Posyandu	53

19. Bukti Pengeluaran Insentif Kader Posyandu.....	54
20. Bukti Pengeluaran Insentif Kader PHBS	54
21. Bukti Pengeluaran Insentif Poskesdes	55
22. Bukti Tanda Terima Operasional Kader Posyandu Desa Margototo.....	56
23. Bukti Tanda Terima Operasional Kader Posyandu Desa Margototo.....	57
24. Tampilan Menu Pelaporan Aplikasi SISKEUDES	59
25. Spanduk APBDes Desa Margototo Tahun 2023.....	61
26. Daftar Hadir Kegiatan Musyawarah Desa	62
27. Laporan Realisasi APBDes Per Sumber Dana Tahun 2023	65
28. Peraturan Desa Margototo Tentang Penetapan Kader Posyandu.....	66
29. Peraturan Desa Margototo Tentang Penetapan Kader Posyandu.....	67
30. SPP Pembinaan LPMD Desa Margosari.....	70
31. Bukti Pengeluaran Pembayaran Pembinaan LPMD	70
32. Tanda Terima Biaya Pembinaan LPMD	71
33. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Margosari Tahun 2023.....	75
34. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Margosari Tahun 2023.....	76
35. Informasi APBDes Desa Margosari Tahun 2023.....	77
36. Daftar Hadir Musyawarah Desa Margosari	78
37. Fitur Entry Data Untuk Input Peraturan di SISKEUDES	79
38. Keputusan Kepala Desa Margosari.....	81
39. Wawancara Peneliti dengan Sekretaris Desa Margototo	120
40. Wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Margototo	120
41. Wawancara Peneliti dengan BPD Desa Margototo	120
42. Wawancara Peneliti dengan Bendahara Desa Margototo	120

43. Wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Margosari	120
44. Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Desa Margototo.....	120
45. Wawancara Peneliti dengan BPD Desa Margosari.....	121
46. Wawancara Peneliti dengan Sekretaris Desa Margosari.....	121
47. Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Desa Margosari	121
48. Wawancara dengan Operator SISKEUDES Desa Margosari	121

DAFTAR SINGKATAN

SISKEUDES	: Sistem Keuangan Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RPJMDesa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
PAD	: Pendapatan Asli Desa
DD	: Dana Desa
ADD	: Alokasi Dana Desa
BHPR	: Bagi Hasil Pajak & Retribusi
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
KEMENDAGRI	: Kementerian Dalam Negeri
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
RKP Desa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RAP	: Rencana Anggaran Pelaksanaan
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
TBP	: Tanda Bukti Penerimaan
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
PRODESKEL	: Program Desa Kelurahan
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PERDA	: Peraturan Daerah
PERKADES	: Peraturan Kepala Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
POSYANDU	: Pos Pelayanan Terpadu
POSKEDES	: Pos Kesehatan Desa
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
MUSRENBANG	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa berperan sebagai unit administratif terkecil yang memiliki peran sentral dalam memajukan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan lokal di daerah tersebut. Salah satu hal yang menjadi fokus penting dalam menggerakkan roda pemerintahan di desa adalah pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini sangat penting mengingat peran vital yang dimainkan oleh sumber daya keuangan dalam kelangsungan operasional pemerintahan desa. Selain penting bagi operasional pemerintahan, keuangan desa juga merupakan aspek penting dalam pembangunan desa.

Dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan mereka, pemerintah pusat telah merumuskan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut memberikan otonomi penuh kepada desa untuk mengelola keuangan mereka sesuai dengan kebutuhan unik masyarakat setempat, sesuai yang tertuang dalam Pasal 72 ayat (1). Dana yang diterima oleh desa untuk menjalankan pemerintahannya juga bukanlah jumlah yang sepele. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 menegaskan bahwa desa berhak atas "Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setidaknya sebesar 10% (*sepuluh perseratus*) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus."

Pengelolaan dana desa bukanlah sekadar opsi, melainkan sebuah keniscayaan yang harus dipegang teguh. Hal ini menjadi semakin jelas ketika kita melihat besarnya alokasi dana yang tersedia. Untuk memberikan gambaran lebih konkret, dalam simulasi perbandingan antara jumlah anggaran dan jumlah desa di Indonesia, rata-rata setiap desa akan menerima sekitar 850 juta rupiah dari APBN. Belum lagi tambahan alokasi dana yang bersumber dari keuangan daerah, jika di kalkulasi total dana yang dikelola oleh setiap desa dapat mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah (Sholeh and Rochansjah 2014). Sedangkan untuk tahun 2023 berdasarkan putusan rapat paripurna DPR RI tentang Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diputuskan dan yang akan di alokasi ke desa berjumlah Rp 70 triliun, dengan rincian dana tersebut akan dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota di Indonesia (Kemenkeu 2023).

Tabel 1. Dana Kelolaan Desa Margototo Tahun 2022

Jenis Pendapatan	Jumlah
Dana Desa (DD)	Rp. 1.057.554.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 997.918.044
Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR)	Rp. 41.472.000
Pendapatan lain-lain (PLL)	Rp. 500.000
Total dana dikelola	Rp. 2.096.944.044

Sumber: Desa Margototo, 2023 (diolah peneliti)

Tabel 2. Dana Kelolaan Desa Margosari Tahun 2022

Jenis Pendapatan	Jumlah
Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 4.000.000
Dana Desa (DD)	Rp. 894.225.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 704.084.500
Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR)	Rp. 38.959.000
Pendapatan lain-lain (PLL)	Rp. 600.000
Total dana dikelola	Rp. 1.641.868.500

Sumber: Desa Margosari, 2023 (diolah peneliti)

Guna meminimalisir adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran tentunya pengelolaan keuangan desa perlu memiliki pedoman yang jelas, aturan mengenai pedoman ini termaktub dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas yang tinggi menjadi landasan kuat dalam pengelolaan keuangan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi suatu keharusan.

Desa perlu menerapkan tata kelola keuangan desa yang baik sebagai pondasi yang kuat dalam proses pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurrizkiana, Handayani, and Widiastuty 2017) mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, ketika keuangan desa dikelola secara transparan dan akuntabel, kepercayaan *stakeholder*, dan masyarakat terhadap pemerintah desa juga akan meningkat. Pengelolaan keuangan desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola keuangan yang baik sangat penting dalam memberikan dukungan kepada pemerintah desa agar mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah desa dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangannya untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Hal ini juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa yang baik berdasarkan tata kelola pemerintahan yang efektif akan memberikan manfaat positif bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

Menimbang urgensinya tersebut maka ada desakan dari komisi IX DPR RI, Presiden, dan ketua KPK agar diadakannya suatu sistem pengelolaan keuangan. Pada tahun 2015 aplikasi SISKEUDES mulai diterapkan dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD hal Aplikasi Pengelolaan

Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tentang Himbuan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi SISKEUDES mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama SISKEUDES, sistem ini berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya SISKEUDES, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa serta membantu mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

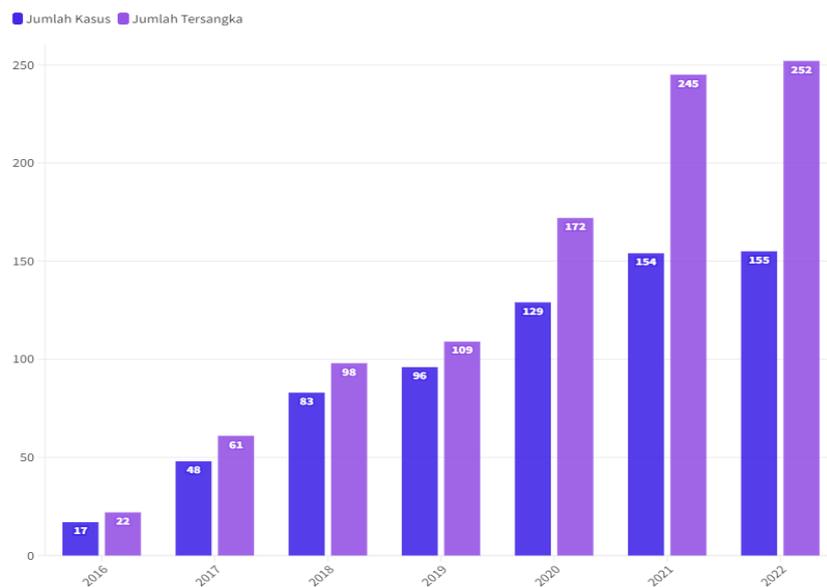
Walaupun penerapan SISKEUDES di Indonesia telah mencapai tingkat masif, sayangnya berbagai permasalahan yang menantang masih terus menghantui pengelolaan keuangan desa di Indonesia, dalam (Putra, Pratiwi, and Suwondo 2012) tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan antara lain ;

1. Tidak transparannya pengelolaan keuangan desa
2. Kekurangan pengawasan dan pengendalian baik dari pemerintah maupun masyarakat
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi

Rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang telah disebutkan, mungkin bisa memicu permasalahan korupsi kedepannya. Minimnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan di desa dapat menciptakan celah yang memungkinkan munculnya tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Sebagai gambaran pada tahun 2022, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* melaporkan fakta yang mengkhawatirkan, mereka menemukan bahwa sebagian besar kasus penindakan korupsi yang melibatkan aparat pemerintah didominasi oleh pelanggaran di sektor anggaran dana desa. Totalnya tak sedikit ada 155 kasus

dengan potensi kerugian yang dialami negara mencapai angka sekitar Rp.381 Miliar (Dihni 2023).

Bahkan di Lampung sendiri angka kasus korupsi yang berkaitan dengan keuangan desa terbilang cukup tinggi dilansir dari (Pradana 2024) sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 kemarin angka penyalahgunaan dana desa di provinsi Lampung menyentuh angka 50 kasus, akibat dari kasus-kasus tersebut kerugian yang dialami oleh negara ditaksir sebesar Rp 14,048 miliar. Belum lagi ditambah keberadaan transfer dana desa dari pusat yang angkanya cukup besar yang turut memiliki andil menjamurnya perilaku korupsi di tingkat desa, seperti yang disampaikan (Fauzanto 2020) bahwa keberadaan dana desa turut menjadi pemicu kenaikan kasus korupsi di Indonesia.



Gambar 1. Kasus Korupsi Dana Desa Paska UU No. 6 Tahun 2014

Melihat tingginya angka korupsi yang justru setiap tahunnya semakin meningkat, menjadi pertanyaan besar di tengah masifnya pengimplementasian SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Implementasi SISKEUDES mulai diterapkan di Desa Margosari dan Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2018, namun dalam lima tahun awal penerapan sistem ini juga tidak luput dari beberapa hambatan di dalam

penerapannya. Hambatan yang di maksud melibatkan berbagai aspek, seperti pemahaman aparatur (operator) terhadap sistem baru dalam pengelolaan keuangan desa, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam mengoperasikan SISKEUDES, serta adanya kendala teknis dalam operasionalisasi sistem tersebut. Selain itu, dari aspek regulasi dan perubahan kebijakan terkait SISKEUDES juga menjadi faktor penghambat yang bilamana aparturnya tidak *update* terhadap regulasi terbaru akan menjadi kekeliruan dalam mengoperasikan SISKEUDES dan berdampak pada proses pengelolaan yang cacat hukum.

Namun dalam pelaksanaannya selama ini terdapat perbedaan yang mencolok antara Desa Margototo sebagai desa induk dan Desa Margosari sebagai pecahannya. Terlihat bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Margototo tidak berjalan dengan maksimal dibanding dengan pembangunan yang dikerjakan desa Margosari,. Hal ini yang tampak pada laporan keuangan yang dilaporkan kepada masyarakat seperti yang diterangkan tabel berikut.

Tabel 3. APBDes Margototo Tahun 2022

Pendapatan	Jumlah
Dana Desa (DD)	Rp. 1.057.554.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 997.918.044
Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR)	Rp. 41.472.000
Pendapatan lain-lain (PLL)	Rp. 500.000
Total	Rp. 2.096.944.044
Belanja	Jumlah
Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.014.498.687
Pembangunan Desa	Rp. 462.939.000
Pembinaan Masyarakat Desa	Rp. 145.200.000
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 49.100.000
Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 432.000.000
Total	Rp. 2.103.737.687

Sumber: Desa Margototo, 2023 (diolah peneliti)

Tabel 4. APBDes Margosari Tahun 2022

Pendapatan	Jumlah
Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 4.000.000
Dana Desa (DD)	Rp. 894.225.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 704.084.500
Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR)	Rp. 38.959.000
Pendapatan lain-lain (PLL)	Rp. 600.000
Total	Rp. 1.641.868.500
Belanja	Jumlah
Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 607.660.970
Pembangunan Desa	Rp. 385.355.000
Pembinaan Masyarakat Desa	Rp. 150.740.000
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 30.480.000
Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 360.000.000
Total	Rp. 1.648.714.558

Sumber: Desa Margosari, 2023 (diolah peneliti)

Dari kedua data di atas ada hal yang ganjal, jika dibandingkan antara penggunaan anggaran pembangunan di kedua desa tersebut, maka Desa Margototo porsi anggarannya jauh lebih besar dengan jumlah Rp. 462.939.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) di tahun 2022, sedangkan Margosari anggaran pembangunannya sebesar Rp. 385.355.000 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*). Jelas dari segi proporsional yang lebih besar maka idealnya pembangunan di Desa Margototo akan lebih masif ketimbang di desa Margosari. Maka dari itu berikut dapat dibandingkan data pembangunan di Desa Margototo & Margosari.

Tabel 5. Pembangunan Desa Margototo Tahun 2022

No.	Uraian Pembangunan	Volume	Prakiraan Anggaran
1.	Pembangunan Jalan Rabat Beton (dusun 7)	376 x 0,15 x 3m (170 m ³)	Rp. 241.000.000
2.	Pembangunan Gorong- Gorong Plat (dusun 3)	7 x 0,6 x 0,6 m (2,5 m ³)	Rp. 25.000.000
3.	Pembangunan Bantuan Jamban Bagi Masyarakat (dusun 2 & 3)	2 Unit	Rp. 8.000.000
TOTAL			Rp. 274.000.000

Sumber: Desa Margototo, 2023 (diolah peneliti)

Tabel 6. Pembangunan Desa Margosari Tahun 2022

No.	Uraian Pembangunan	Volume	Prakiraan Anggaran
1.	Pemeliharaan Badan Jalan (dusun 1)	350m x 3m (1050 m ²)	Rp. 87.000.000
2.	Jalan Telford (dusun 1)	500 m x 3 m x 0,2 (2400 m ²)	Rp. 180.000.000
3.	Gorong-Gorong (dusun 1)	4 x 0,6 x 0,6 m 1,44 m ³ x 4: (5,8 m ³)	Rp. 58.000.000
4.	Gorong-Gorong (dusun 1)	5 x 0,6 x 0,6 1,8 m ³ x2 : (3,6m ³)	Rp. 36.000.000
5.	Pembukaan Badan Jalan (dusun 2)	1000 m x 3 m (3000 m ²)	Rp. 45.000.000
TOTAL			Rp. 406.000.000

Sumber: Desa Margosari, 2023 (diolah peneliti)

Namun dari data perbandingan pembangunan di Desa Margototo dan Margosari ditemukan fakta bahwasanya pembangunan yang terjadi di Desa Margosari jauh lebih masif ketimbang Desa Induk Margototo, hal ini sangat jelas nampak dari segi kuantitas jumlah maupun volume pembangunan yang dikerjakan di kedua desa tersebut. Ini tentunya mengindikasikan adanya tindakan tidak akuntabel dari aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Meskipun jika dibandingkan dari sisi anggaran tentu

seharusnya Desa Margototo jauh lebih masif pembangunannya, karena anggaran pembangunan Margototo tahun 2022 sebesar Rp. 462.939.000 namun dalam prakiraan kalkulasi baru terpakai sebesar Rp. 274.000.000, tentu selisih uang sisa yang sangat banyak. Kemudian sama juga dengan Margototo di Desa Margosari ada gap anggaran dari APBDes sebesar Rp. 385.355.000 dan prakiraan kalkulasi sebesar Rp. 406.000.000. Sekecil apapun dana tentu perlu ada transparansi jika tidak ini tentunya berakibat akuntabilitas keuangan desa menjadi tidak optimal. Namun jika kita lihat dari beberapa penelitian kehadiran SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan di desa justru telah membuktikan memberi manfaat yang baik bagi pengelolaan keuangan desa, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa :

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	(Rifai and Aryani 2022)	Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Mekarmulya Kabupaten Karawang Studi Kasus: Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat	Hasil penelitiannya setelah menerapkan SISKEUDES pengelolaan keuangan di Desa Mekarmulyo semakin dipermudah karena pembuatan laporan keuangan sudah otomatis melalui sistem sehingga proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih mudah, cepat, jujur dan sistematis. Tetapi dibalik itu, masih ada beberapa hambatan dalam implementasinya, yaitu fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai seperti kekurangan pasokan laptop dan fasilitas internet yang kadang-kadang berjalan lambat serta kemampuan SDM yang terbatas.
2	(Juardi, Muchlis, and Amalia Putri 2018)	Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa	Penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Jenetallasa secara signifikan meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Aplikasi ini mempermudah proses pelaporan keuangan desa, meningkatkan transparansi dan berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
3	(Faizah and Sari 2022)	Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan	Penelitiannya menemukan bahwa SISKEUDES membantu Pemerintah Desa Banyudono dalam mengelola keuangan desa melalui pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi memberikan

No.	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil
		Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun	kemudahan dalam hal pelaporan secara tepat waktu dan pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.
4	(Maharani and Akbar 2020)	Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerapan SISKEUDES memiliki korelasi pada akuntabilitas keuangan desa melalui <i>output</i> laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi tersebut, yang dengannya desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan melalui laporan tersebut baik kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto (akuntabilitas vertikal) maupun kepada masyarakat desa (akuntabilitas horizontal).
5	(Ridwan 2019)	Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	Penelitian skripsinya menyatakan bahwa aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik, karena mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan mampu menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, sehingga dengan penerapan aplikasi SISKEUDES mampu berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam rangka mewujudkan tata kelola desa yang baik.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah peneliti jadikan referensi guna menunjang penelitian yang sedang penulis teliti, semuanya memiliki kesamaan yang serupa yakni terkait adanya manfaat positif yang di dapat melalui penerapan SISKEUDES terhadap pengimplementasian nilai-nilai akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang baik di desa. Namun sudah genap 8 tahun sejak implementasi SISKEUDES, masih saja terdapat banyak penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa yang angkanya setiap tahun terus meningkat. Oleh karena fenomena tersebutlah peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa**

Margototo dan Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini tentang “

Bagaimana penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Margosari dan Margototo terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah peneliti buat maka tujuan penelitian ini ialah: Mengetahui penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Margosari dan Margototo terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Menambah pemahaman dan wawasan tentang penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa
 - b. Menyediakan referensi dan sumber informasi yang berguna bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam hal penerapan sistem keuangan desa.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan untuk para aparatur desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa yang berbasis Sistem Keuangan Desa agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih baik dan akuntabel.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Keuangan Desa

2.1.1 Definisi Sistem Keuangan Desa

SISKEUDES merupakan sebuah aplikasi yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Pembuatan SISKEUDES dilatarbelakangi diresmikannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, akibat peraturan tersebut desa kini memiliki hak untuk memperoleh sebagian dana dari pusat dan diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Selain itu ada desakan pula dari komisi IX DPR RI, Presiden, dan ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar diadakannya suatu sistem pengelolaan keuangan yang harus diimplementasikan seluruh desa di Indonesia.

Aplikasi SISKEUDES mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi SISKEUDES mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari aplikasi SISKEUDES yaitu V1.0.R1.06, aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan laporan APBDes Tahun Anggaran 2018. Pada Bulan April 2018,

Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga aplikasi SISKEUDES perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut dengan SISKEUDES versi terbaru dikeluarkan dengan rilis Versi 2.0.

Sebagaimana versi sebelumnya, aplikasi SISKEUDES 2.0 menggunakan *database Microsoft Access* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan *database Microsoft Access* ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan *database SQLServer* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Aplikasi SISKEUDES ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan aplikasi SISKEUDES oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi SISKEUDES kepada Kemendagri atau perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan aplikasi SISKEUDES dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi SISKEUDES dilakukan dengan cara memberikan kode SML (kode aktivasi SISKEUDES) pemerintah daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri. (*APLIKASI SISKEUDES - PENDAMPINGDESA*, 2022)

(Faizah and Sari 2022) SISKEUDES adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan atau pertanggungjawaban.

2.1.2 Keunggulan Sistem Keuangan Desa

Keunggulan dan kelebihan dari aplikasi SISKEUDES adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan regulasi: Aplikasi SISKEUDES dirancang sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan Keuangan Desa, sehingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Kemudahan dalam tata kelola: Aplikasi SISKEUDES mempermudah tata kelola keuangan desa dan dana desa dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan proses pengelolaan keuangan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.
3. *User friendly*: Aplikasi ini dirancang secara *user friendly*, sehingga mudah digunakan oleh pengguna di tingkat pemerintah desa tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam.
4. Panduan implementasi: Aplikasi SISKEUDES didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi yang membantu pengguna dalam memahami dan mengimplementasikan aplikasi dengan baik.
5. Partisipasi semua pihak terkait: Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan melalui keterlibatan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, termasuk memperhatikan aspek *internal control* yang menjadi bagian integral dari aplikasi ini.
6. *Maintenance* yang berkelanjutan: Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi resmi pemerintah, sehingga memiliki jaminan adanya *maintenance* dan pembaruan secara teratur untuk menjaga kelancaran dan keandalan aplikasi.
7. Integrasi dengan aplikasi terkait: Aplikasi SISKEUDES dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, seperti aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) milik Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pembangunan Desa

(SIPEDA) milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Integrasi ini membantu memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh dan terintegrasi. (Keunggulan Dan Kelebihan Aplikasi SISKEUDES 2.0 - Info Desa, n.d.)

2.1.3 Penggunaan Aplikasi SISKEUDES

Dalam operasional aplikasi SISKEUDES terdapat langkah-langkah yang menjadi prosedur yang harus dilakukan dalam penggunaan aplikasi ini, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk akses aplikasi SISKEUDES, gunakan menu *login* dengan mengisi *User ID*. Admin SISKEUDES pemerintah daerah akan menyediakan *login* khusus untuk setiap desa dengan *User ID* dan *password* yang berbeda. Tahun anggaran diisi sesuai dengan tahun yang akan diinput.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi Siskeudes

2. Kemudian setelah berhasil *login*, operator diharuskan mengisi beberapa parameter sebelum bisa mengoperasikan aplikasi
3. Jika sudah langkah berikutnya ialah *data entry*, Pengelompokan menu *data entry* terdiri dari 4 modul yakni, Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pembukuan.

a. Pengoperasian Modul Perencanaan

1. Klik menu *Data Entry* => Perencanaan => Visi Misi dan RPJM Desa
2. Pilih Desa => nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa
3. Pilih RPJM Desa => Pilih tombol Bidang sehingga terbuka Tab Bidang.
4. Klik Tambah untuk memulai pengisian
5. Pilih bidang untuk memilih kode Bidang dan nama Bidang
6. Klik tombol simpan bila sudah selesai.
7. *Double* klik nomor Bidang yang sudah disimpan atau klik tab Sub Bidang
8. Klik Tambah untuk memulai pengisian
9. Pilih tanda elipsis untuk memilih kode Sub Bidang,
10. Klik tombol bila sudah selesai.
11. *Double* klik nomor Sub Bidang yang sudah disimpan atau klik tab Kegiatan sehingga tampak sebagai berikut.

PERENCANAAN Visi Misi dan RPJM Desa

PEREMINTAH DESA SIMULASI

DATA RENCANA KEGIATAN DESA

Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Kd Keo	Nama Kegiatan
01.2031.01.01.01.01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Kode: 01.2031.01.01.01.01.01

Kegiatan: Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Sas Renstra: Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat

Lokasi: Desa AR

Keluaran: Terbayarnya elite dan tunjangan Kepala Desa

Sasaran, Manfaat: Pelayanan masyarakat yang memadai

Pelaksanaan:

Tahun 1 Tahun 4 Swateola

Tahun 2 Tahun 5 Ke Jember Aritai Desa

Tahun 3 Tahun 6 Piliuk Kelja

Cetak Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Jutup

Gambar 3. Tampilan Aplikasi Siskeudes

12. Pilih tanda elipsis untuk memilih kode Kegiatan, Pilih sasaran renstra, isi lokasi, keluaran, sasaran, manfaat dan pelaksanaan.
13. Klik tombol bila sudah selesai.
14. *Double* klik nomor Kegiatan yang sudah disimpan atau klik tab Dana Indikatif sehingga tampak sebagai berikut.



Gambar 4. Tampilan Aplikasi Siskeudes

15. Klik Tambah untuk memulai pengisian
16. Isi Tahun, Lokasi, Volume, Sasaran wanita, sasaran pria, sasaran RTM, pelaksana, sumberdana, biaya, waktu, mulai hingga selesai kegiatan, dan pola kegiatan. Ulangi pengisian kegiatan dan tahunnya sesuai dokumen RKPDesa.
17. Akhiri dengan klik tombol bila sudah selesai.
18. Cetak hasil Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah dibuat.

b. Pengoperasian Modul Penganggaran

b.1 Pendapatan

1. Pilih menu *Data Entry* => Penganggaran => Isian Data Anggaran
2. Pilih Desa => Nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa
3. Kemudian pilih **Pendapatan** sehingga tampak isian formulir sebagai berikut.

The screenshot shows the 'PEMERINTAH DESA SIMULASI' application with the 'DATA PENDAPATAN DESA' form. The form is titled 'Bidang : Pendapatan Desa'. It features a table with the following data:

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	35.500.000,00	0,00
4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Ro	45.000.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	950.000.000,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabu	50.000.000,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	450.000.000,00	0,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	15.000.000,00	0,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/It	10.000.000,00	0,00

Below the table, the 'Kode' field is set to '4.1.1.01.' and the 'Nama Rekening' field is 'Bagi Hasil BUMDes'. The summary fields show: 'Anggaran' 35.500.000,00, 'Perubahan' 0,00, and 'Jumlah' 35.500.000,00. The toolbar at the bottom includes buttons for 'Tambah', 'Ubah', 'Hapus', 'Batal', 'Simpan', 'Cetak', and 'Tutup'.

Gambar 5. Tampilan Aplikasi Siskeudes

4. Klik pada tombol Tambah
5. Klik tombol untuk memilih kode Rekening pendapatan.
6. Pilih Kode Nama Kelompok Pendapatan, Nama Jenis Pendapatan, dan Nama Obyek Pendapatan.
7. Klik tombol Simpan untuk menyimpan pilihan Pendapatan.
8. Lakukan *Double* klik pada nama Pendapatan sehingga tab berpindah pada rincian data RAP Rinci Pendapatan
9. Lakukan Pengisian data RAP dengan memasukkan Rincian RAP, contoh: ADD kabupaten/kota 1 tahun x Rp

450.000.000,00. Secara otomatis perkalian tahun dan satuan tahun terkalkulasi. Hasil perkalian juga langsung direkap pada Obyek Pendapatan yang bersangkutan.

10. Akhiri dengan tombol Simpan.

b.2 Belanja

1. Klik menu *Data Entry* – Penganggaran – Isian data Anggaran
2. Pilih Desa => *Double* klik Kecamatan dan Nama Desa
3. Pilih tombol **Belanja**
4. *Double* klik nama Bidang sehingga tab berpindah ke Kegiatan
5. *Double* klik nama Kegiatan sehingga Tab berpindah pada RAB sehingga tampak isian formulir berikut

The screenshot shows the 'DATA BELANJA DESA' form in the Siskeudes application. The form is titled 'PEMERINTAH DESA SIMULASI' and 'DATA BELANJA DESA'. It displays the following information:

- Bidang:** BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan:** Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	0,00
5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	4.200.000,00	0,00
5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	12.500.000,00	0,00

Below the table, the 'Kode' field is set to 5.1.1.01, and the 'Nama Rekening' is 'Penghasilan Tetap Kepala Desa'. The total budget is 58.700.000,00, and the 'Anggaran' field is 42.000.000,00. The 'Perubahan' field is 0,00, and the 'Jumlah' field is 42.000.000,00.

Gambar 6. Tampilan Aplikasi Siskeudes

6. Klik Tambah dan pilih kode rekening Belanja dengan menekan tombol Kode.
7. Pilih kode rekening Belanja Desa mulai dari level Jenis, Objek dan Rincian Obyek Belanja.

8. Klik Simpan untuk menyimpan hasil pilihan rekening Belanja.
9. *Double* klik nama rekening yang sudah tersimpan sehingga tab berpindah pada RAB Rinci seperti tampak berikut

... Data Umum dan Penganggaran

PEMERINTAH DESA SIMULASI

DATA BELANJA DESA

Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 Rekening : 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa Rp 0,00

No	Uraian	Anggaran	AnggaranPAK
01	Gaj Kepala Desa	42.000.000,00	0,00

Nomor Urut: 01 | 0,00 | 0,00
 Uraian: Gaj Kepala Desa | Max:50Chr

[Rincian]

Anggaran	42.000.000,00	Jumlah Satuan	12 bulan
Perubahan	0,00	Harga Satuan	3.500.000,00
Jumlah	42.000.000,00	Sumberdana	Alokasi Dana Desa

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Gambar 7. Tampilan Aplikasi Siskeudes

10. Klik tambah dan secara otomatis nomor urut terisi.
11. Isi uraian belanja sesuai dengan peruntukannya, jumlah satuan, satuan belanja, harga satuan dan sumber dana
12. Klik Simpan bila sudah selesai, secara otomatis jumlah terkalkulasi dan direkap pada obyek belanja yang bersangkutan

c. Pengoperasian Modul Penatausahaan

c.1 Penerimaan

1. Klik menu tambah untuk memulai *entri* penerimaan.
2. Isi Nomor bukti, tanggal bukti penerimaan, uraian penerimaan, nama dan alamat penyeter
3. Klik Simpan bila sudah selesai

4. *Double* klik nomor TBP yang sudah *diinput* sehingga tab penerimaan pindah ke Rincian TBP



Gambar 8. Tampilan Aplikasi Siskeudes

5. Klik tambah untuk memulai pengisian kode rekening pendapatan desa
6. Klik untuk memilih kode rincian pendapatan yang tercantum dalam RAP Pendapatan.
7. Lakukan pengisian nilai/jumlah penerimaan
8. Klik Simpan untuk mengakhiri isian.
9. Klik Cetak untuk menampilkan bukti penerima

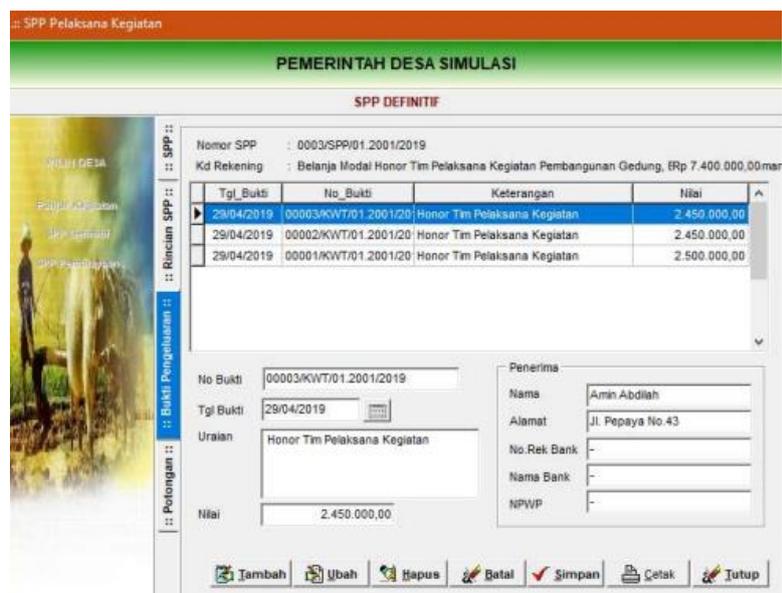
c.2 Pengeluaran

1. Klik tombol Tambah untuk memulai *entry* SPP
2. Isi nomor, tanggal SPP dan uraian pembayaran
3. Klik Simpan bila sudah selesai.
4. Lakukan *Double* klik nomor SPP atau pindah Tab Rincian SPP



Gambar 9. Tampilan Aplikasi Siskeudes

5. Klik tombol Tambah untuk memulai pengisian rincian belanja
6. Pilih kode rekening belanja dan klik Simpan
7. Klik 2x Rincian Belanja atau Pindahkan ke Tab Bukti Pengeluaran



Gambar 10. Tampilan Aplikasi Siskeudes

8. Klik Tambah untuk memulai pengisian bukti pengeluaran
9. Isi nomor bukti, tanggal, uraian pembayaran, nama penerima, alamat dan nilai pembayaran.
10. Klik Simpan untuk mengakhiri.
11. Lanjutkan dengan bukti kuitansi lainnya.
12. Jika dalam pengeluaran tersebut terdapat potongan-potongan seperti pajak, maka lakukan *input* data pemotongan ke Tab Potongan.
13. Klik Tambah untuk memulai pengisian data pemotongan
14. Pilih tombol elipsis untuk mengambil Kode Potongan sesuai Parameter yang disediakan.
15. Isikan besaran nilai potongan. Klik Simpan untuk mengakhiri.

c.3 Laporan Penatausahaan terdiri atas menu berikut:

The screenshot shows the 'Laporan Penatausahaan Keuangan Desa' (Village Financial Management Report) interface. The title bar reads 'PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI' and 'PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA'. On the left, there is a list of report types with radio buttons: 'Buku Kas Umum' (selected), 'Buku Pembantu Kas Tunai', 'Buku Pembantu Bank', 'Buku Pembantu Penerimaan', 'Buku Pembantu Kegiatan', 'Buku Pembantu Pajak', 'Buku Pembantu Pajak Rekap', 'Buku Pembantu Pajak per Jenis', 'Buku Pembantu Panjar', 'Register SPP Pengeluaran', and 'Register Kwitansi Pembayaran'. On the right, there are dropdown menus for 'Tanggal' (01/01/2019 s.d 31/12/2019), 'Kecamatan' (01 KECAMATAN MARGASARI), and 'Desa' (01.2001. PEMERINTAH DESA SIMULASI). At the bottom right, there is a 'Footer' field containing 'XYZ. 15 Oktober 2018'. At the very bottom, there are buttons for 'Print To File', 'Cetak' (with a checkmark icon), and 'Keluar' (with a pencil icon).

Gambar 11. Tampilan Aplikasi Siskeudes

d. Pengoperasian Modul Pelaporan

Menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Desa

2. Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
3. Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulanan dan semesteran)
4. Laporan Kekayaan Milik Desa
5. Laporan Realisasi Anggaran per Sumber Dana
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
7. Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225

Untuk mencetak laporan pembukuan klik menu Laporan Pembukuan sehingga tampak tampilan berikut.

Gambar 12. Tampilan Aplikasi Siskeudes

1. Pilih jenis laporan yang akan dicetak
2. Pilih kode Kecamatan dan Desa
3. Klik Cetak untuk menayangkan laporan
4. *Print* ke Media *Printer*

2.2 Tinjauan Akuntabilitas

2.3.1 Definisi Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari kata "*accountability*" dalam bahasa Inggris, memiliki makna pertanggungjawaban atau dengan kata lain kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambil. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang atau suatu entitas bertanggungjawab atas tindakan, keputusan, atau hasil dari aktivitas yang telah dilakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary*, akuntabilitas adalah "*required or expected to given an explanation for one's action* atau diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas tindakan seseorang" (Raba 2020).

Jika diperhatikan seksama ada kesamaan pemaknaan yakni akuntabilitas berbicara seputar tindakan/keadaan. Kata akuntabilitas selalu melekat dalam setiap kinerja atau tindakan, sebab prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, atau hasil yang dicapai dalam melaksanakan kewenangan tersebut. (Mardiasmo 2006) mendefinisikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, mengungkapkan, dan melaporkan semua aktivitas pemerintahan kepada pihak yang memberikan amanah, yaitu masyarakat. Sedangkan menurut (Halim and Dkk. 2012) akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menjelaskan kinerja dan tindakan individu, badan hukum, atau kepemimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan tersebut. Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban mengenai kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan dalam suatu

organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban tersebut (Nafidah and Anisa 2017).

Dari kalimat-kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki makna pertanggungjawaban atau kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambil. Akuntabilitas merupakan prinsip yang melekat dalam setiap kinerja atau tindakan, di mana seseorang atau suatu entitas bertanggungjawab atas tindakan, keputusan, atau hasil dari aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas melibatkan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, seperti masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

2.3.2 Indikator Akuntabilitas

Menurut (Djalil 2014), terpenuhinya akuntabilitas suatu kegiatan atau program tertentu dapat diukur dengan beberapa indikator yakni sebagai berikut:

1. Integritas Keuangan: Ini berarti laporan keuangan harus dapat menggambarkan informasi yang valid, tanpa menyembunyikan apapun. Semua informasi harus menggambarkan situasi sesungguhnya tanpa ada yang disembunyikan dan dimanipulasi.
2. Pengungkapan : Pengungkapan adalah tentang menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun untuk memberikan gambaran lengkap dari semua proses dan aktivitas yang telah diselenggarakan suatu kelompok/organisasi dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan tersebut harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pihak-pihak yang terkait.
3. Ketaatan: Ketaatan dalam pencatatan keuangan artinya patuh terhadap peraturan yang ada dan dalam prosesnya menerapkan prinsip akuntansi dalam segala bentuk pencatatan keuangan. Prinsip dari akuntansi terdiri dari keadilan, kebenaran dan

pertanggungjawaban. Maka dari itu setiap pencatatan transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi harus dilakukan dengan benar, jelas, informatif, serta ditujukan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi di dalam prosesnya.

2.3.3 Fungsi Akuntabilitas

Menurut (Bowen dalam Tawallo et al., 2021) menerangkan bahwa prinsip akuntabilitas memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Alat kontrol tugas: Akuntabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pemimpin selama masa jabatan tertentu. Dewan pengawas dan pihak yang berkepentingan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Dengan adanya akuntabilitas, pemimpin dapat dipertanggungjawabkan atas tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Mencegah penyalahgunaan tugas: Penyalahgunaan tugas dan wewenang cenderung mengarah pada tindakan korupsi. Kelemahan dalam sistem organisasi meningkatkan risiko terjadinya budaya korupsi. Akuntabilitas berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan tugas dan meminimalkan potensi terjadinya korupsi.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja: Akuntabilitas juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja. Suatu aktivitas dianggap efisien ketika mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Dengan adanya akuntabilitas, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dapat ditetapkan dengan jelas, sehingga mendorong peningkatan kualitas kerja dan pencapaian tujuan yang efektif.

Dalam keseluruhan, prinsip akuntabilitas memiliki peran penting dalam memberikan kontrol, mencegah penyalahgunaan tugas, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja. Dengan penerapan

prinsip akuntabilitas yang baik, organisasi atau pemerintahan dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih baik dan meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.

2.3 Tinjauan Keuangan Desa

2.3.1 Pengertian Keuangan Desa

Merujuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pada umumnya sumber keuangan desa berasal dari 3 (Tiga) sumber pendanaan yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
 - a) Hasil usaha (Hasil BUMDesa)
 - b) Hasil aset (Tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa)
 - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong (penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa)
 - d) Pendapatan asli Desa lain (hasil pungutan Desa)
2. Dana dari Pemerintah (transfer)
 - a. Dana Desa
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
 - c. Alokasi dana desa
 - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

3. Pendapatan lain
 - a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
 - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
 - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
 - e. Bunga bank
 - f. Pendapatan lain Desa yang sah

2.3.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus dijalankan dengan memenuhi beberapa asas berikut;

1. Transparan

Asas transparan mengharuskan setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Informasi terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan jelas.

2. Akuntabel

Asas akuntabel menekankan pentingnya bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban

3. Partisipatif

Asas partisipatif mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa. Masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam merumuskan kebijakan,

mengawasi pelaksanaan kegiatan, serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengelolaan keuangan desa.

4. Tertib

Asas tertib mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengelolaan keuangan desa harus mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan terciptanya ketertiban dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa.

5. Disiplin anggaran

Asas disiplin anggaran menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara anggaran yang telah disusun dengan realisasi kegiatan yang dilakukan. Setiap penggunaan dana desa harus sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Disiplin anggaran juga meliputi pengendalian pengeluaran, pemantauan realisasi anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

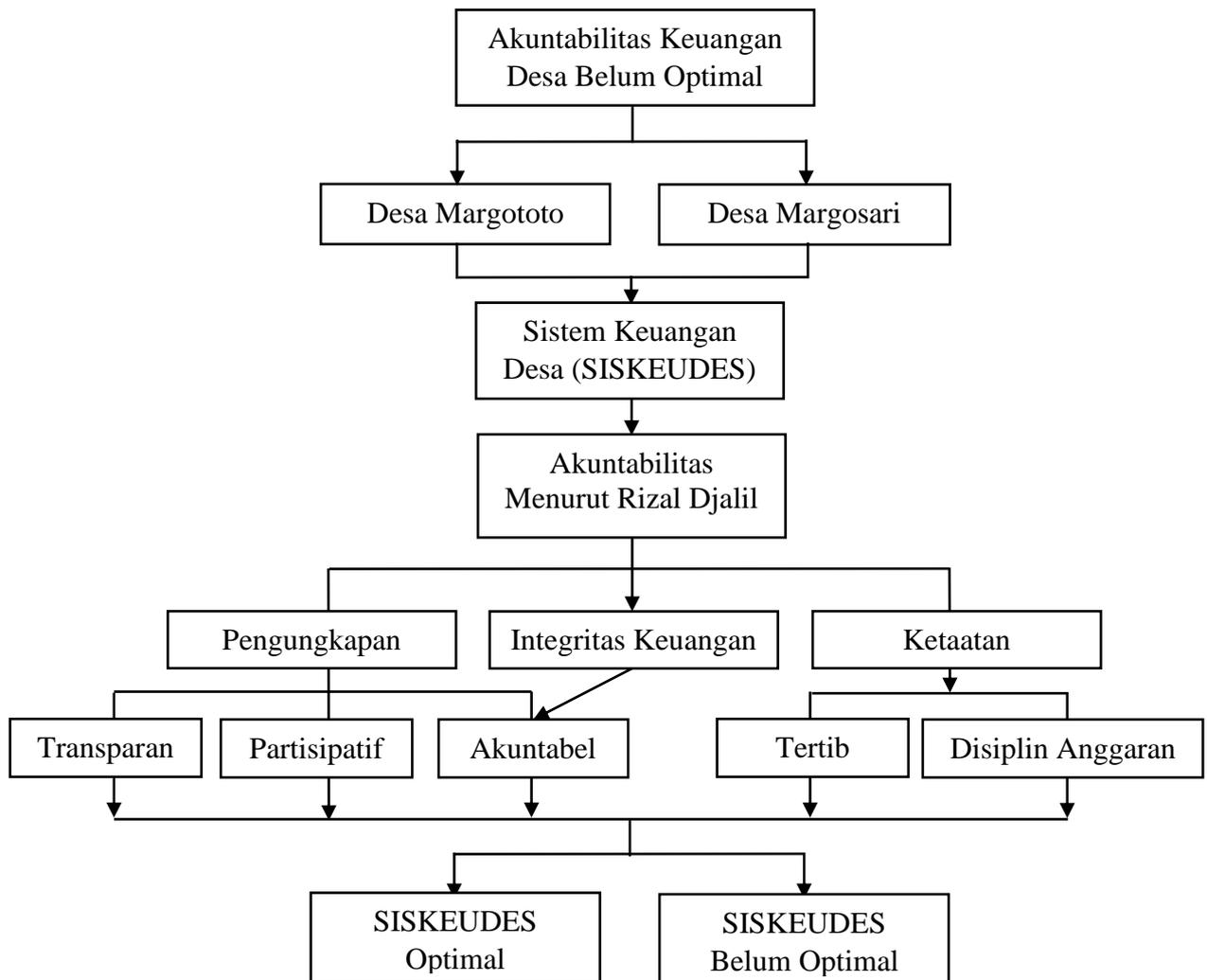
2.2 Kerangka Pikir

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mulai berlaku pada tahun 2015 hingga seterusnya menyebabkan sokongan dana desa yang berasal dari APBN kian membesar. Namun seiring penerapan undang-undang tersebut angka korupsi di lingkup desa juga semakin meningkat, akibat minimnya pengawasan serta akuntabilitas keuangan desa. Begitupun yang terjadi di lokasi penelitian ada dugaan pelanggaran terhadap akuntabilitas keuangan desa, hal ini nampak dari gap antara anggaran pembangunan Margototo sebesar Rp. 462.939.000 namun secara prakiraan kalkulasi volume pembangunan hanya sebesar Rp. 274.000.000. Sama juga dengan Margototo di Desa Margosari ada gap anggaran dari APBDes sebesar Rp. 385.355.000 dan prakiraan kalkulasi sebesar Rp. 406.000.000.

Maka dari itu untuk mengetahui optimal atau tidaknya penggunaan SISKEUDES, penelitian ini akan menentukannya berdasarkan terpenuhinya

tujuan diluncurkannya aplikasi ini yakni dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan serta asas-asas pengelolaan keuangan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Oleh karena itu di sini peneliti akan menganalisis penerapan sistem tersebut dengan menggunakan indikator akuntabilitas dari Rizal Djalil : 2014 yang terdiri dari :

1. Integritas keuangan
2. Pengungkapan
3. Ketaatan.



Gambar 13. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini berfokus pada jenis penelitian deskriptif yang mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendalami satu variabel penelitian dengan tujuan memberikan pemahaman yang rinci sesuai dengan permasalahan penelitian. Penelitian deskriptif memberikan landasan untuk menjelaskan karakteristik khusus dari fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, karakteristik kualitatif digunakan untuk menghasilkan deskripsi yang mendalam, yang bisa berbentuk kata-kata atau bahkan gambar (Sugiyono 2019).

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menjelajahi beragam sudut pandang, interpretasi, dan pengalaman individu yang terlibat, membuka jendela yang mendalam untuk menganalisis penerapan sistem keuangan desa di Desa Margosari maupun Margosari. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk merinci dan menggambarkan dengan cermat tentang topik atau masalah yang sedang diteliti, berdasarkan pengalaman dan temuan yang terungkap di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mempersempit lingkup studi kualitatif, sambil secara selektif memilah data yang relevan dan membedakan data yang kurang relevan (Moleong 2018). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi dari masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan dan teori yang dipergunakan, penelitian fokus pada “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Desa” yang dalam hal ini penelitian menilai optimalnya penerapan aplikasi tersebut bilamana mampu mencapai tujuan aplikasi yakni mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas, serta memenuhi asas pengelolaan keuangan desa yang diatur Permendagri No. 20 Tahun 2018. Oleh karena itu untuk menilainya peneliti menilai penerapannya dengan menggunakan indikator akuntabilitas sebagai berikut.

1. Integritas Keuangan, Ini berarti laporan keuangan harus jujur dan transparan, tanpa menyembunyikan apapun. Semua informasi harus menggambarkan situasi sesungguhnya tanpa ada yang disembunyikan dan dimanipulasi.
2. Pengungkapan adalah tentang menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun untuk memberikan gambaran lengkap dari semua proses dan aktivitas yang telah diselenggarakan suatu kelompok/organisasi dalam satu periode tertentu.
3. Ketaatan dalam pencatatan keuangan artinya patuh terhadap peraturan yang ada dan dalam prosesnya menerapkan prinsip akuntansi dalam segala bentuk pencatatan keuangan.

Asas pengelolaan keuangan desa Permendagri No. 20 Tahun 2018:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif
4. Tertib
5. Disiplin anggaran

3.3 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan teoritis dan pemahaman yang mendalam terhadap fokus permasalahan penelitian. Penelitian dilakukan pada dua desa, yaitu Desa Margototo dan Desa Margosari, yang berada di Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian di sana dilakukan guna mendapatkan fenomena atau

peristiwa yang sebenarnya terjadi di lokasi yang diteliti, dalam rangka untuk mendapatkan data-data yang akurat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta atau peristiwa dalam bentuk mentah yang belum mengalami proses pengolahan. Menurut (Moleong 2018) sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan tindakan, untuk selanjutnya ditunjang dengan data sekunder yang mana berbentuk dokumen, sumber data tertulis, foto, atau data-data statistik. Untuk selanjutnya terkait dengan sumber data dan subyek dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang bisa didapatkan secara langsung dari tangan pertama di lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Dalam hal ini, data primer pada penelitian ini berupa hasil dari wawancara yang dilakukan kepada para informan. Adapun informan yang dimaksud merupakan aparatur pemerintah, BPD, serta masyarakat di Desa Margototo dan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang dikutip dari sumber lain berbentuk dokumen seperti literatur, dokumen negara seperti peraturan menteri dan surat edaran menteri, jurnal ilmiah, artikel, internet, karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta bahan referensi lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

3.5 Informan Penelitian

Menurut (Moleong 2018), informan dalam penelitian dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada latar permasalahan penelitian. Informan yang ditentukan dalam penelitian kualitatif ini dengan menentukan narasumber yang menjadi pihak yang diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan

permasalahan atau fokus penelitian (*purposive sampling*). Alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* bertujuan untuk mengambil informan secara objektif, dengan anggapan bahwa informan yang diambil merupakan keterwakilan (*representative*) bagi peneliti. Sehingga menurut peneliti teknik *purposive sampling* sangat tepat untuk digunakan untuk melihat analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa yang optimal. Adapun informan pada penelitian ini antara lain:

Tabel 8. Informan Penelitian Desa Margototo

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Al Qomarudin	Kepala Desa
2.	Antono	Sekretaris Desa
3.	Rohani, SE	Kaur Keuangan
4.	Tumiran	BPD
5.	Jumawan	Masyarakat Desa

Sumber: Desa Margototo, 2023 (diolah peneliti)

Tabel 9. Informan Penelitian Desa Margosari

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Suwardi	Kepala Desa
2.	Suranto	Sekretaris Desa
3.	Ulfa	Operator SISKEUDES
4.	Purwanto	BPD
5.	Aris	Masyarakat Desa

Sumber: Desa Margosari, 2023 (diolah peneliti)

Berdasarkan hasil informan di atas, dari berbagai aspek dapat dilihat untuk menjelaskan jawaban dari penelitian ini, sehingga informan di atas dianggap berkompeten dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan besar dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci pada pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini telah dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono 2019).

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut (Esterberg dalam Sugiyono, 2019), wawancara adalah pertemuan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan pikiran melalui tanya jawab, sehingga dapat mendapatkan sebuah informasi pada suatu topik yang dituju. Pada penelitian ini, peneliti telah mewawancarai beberapa informan yang dianggap sebagai informan penting.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada :

Nama	Jabatan	Waktu Wawancara
Al Qomarudin	Kepala Desa Margototo	28 Maret 2024
Antono	Sekretaris Desa Margototo	28 Maret 2024
Rohani	Kaur Keuangan Desa Margototo	28 Maret 2024
Tumiran	BPD Desa Margototo	28 Maret 2024
Jumawan	Masyarakat Desa Margototo	28 Maret 2024
Suardi	Kepala Desa Margosari	03 April 2024
Suranto	Sekretaris Desa Margosari	20 Mei 2024
Ulfa	Operator SISKEUDES Desa Margosari	22 April 2024
Purwanto	BPD Desa Margosari	20 Mei 2024
Aris	Masyarakat Desa Margosari	03 April 2024

2. Observasi

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data adalah menyelidiki atau mengamati hal-hal yang tidak didapat pada saat wawancara. Melalui metode ini peneliti bisa mengamati langsung fenomena ataupun data-data lain yang bentuknya non-wawancara sebagai data tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman maupun gambar.

Dalam penelitian ini teknik observasi dipergunakan untuk mengamati proses penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Margosari dan Margototo, dalam pelaksanaannya peneliti mendatangi kantor-kantor desa untuk mengamati peristiwa ketika operator Siskeudes sedang mengoperasikan aplikasi tersebut untuk menunjang pengelolaan keuangan desa.

3. Dokumentasi

Pendekatan dokumentasi menjadi elemen penting dalam metodologi penelitian kualitatif, berfungsi sebagai pelengkap bagi observasi dan wawancara (Sugiyono 2019). Teknik ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan beragam data sekunder yang berasal dari sumber tertulis seperti dokumen. Dokumen memiliki nilai penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap inti penelitian, dapat digunakan untuk melakukan *triangulasi* data guna memastikan konsistensi temuan, dan merupakan komponen integral dalam proses penelitian.

Berikut beberapa dokumen yang digunakan dalam penelitian ini

- a. Wawancara dengan narasumber
- b. Surat Pertanggungjawaban Kegiatan
- c. Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa
- d. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes
- e. Surat Permintaan Pembayaran

- f. Tanda Bukti Pengeluaran Uang
- g. Spanduk APBDes
- h. Keputusan Kepala Desa Margototo Tentang Penetapan Kader Posyandu
- i. Keputusan Kepala Desa Margosari Tentang Pembentukan LPMD
- j. Tanda Terima Kegiatan Posyandu
- k. Tanda Terima Kegiatan LPMD

3.7 Teknik Pengolahan Data

Adapun kegiatan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing Data adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan faktor data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti telah mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada faktor pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Dalam mengolah hasil observasi, peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil observasi di lapangan sehingga dapat ditampilkan dengan baik disertai dengan adanya dokumentasi yang dapat menunjang pembahasan dalam penelitian.

2. Interpretasi Data

Tahap ini peneliti memberikan jabaran dari berbagai data yang telah diolah pada proses *editing* sesuai dengan faktor penelitian. Teknik ini dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis data yang diperoleh dengan dibedakan berdasarkan kriteria pertanyaan ataupun hal khusus lainnya. Dalam pelaksanaan interpretasi data dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat yang bersifat narasi dan deskriptif atas data-data yang sudah disesuaikan kebutuhan penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menyederhanakan, memfokuskan, menyeleksi, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian (Hikmawati 2017). (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga selesai yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan panduan analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis ini sendiri sudah berlangsung sejak pengumpulan data dilakukan, yang kemudian langkah selanjutnya data tersebut dianalisis. Model analisis ini bertujuan untuk mencapai data yang paling kredibel, yang apabila pada proses pelaksanaannya analisis jawaban dari wawancara kurang memuaskan maka peneliti mengulangi proses dengan melanjutkan pertanyaan sampai data tersebut terpenuhi (Sugiyono 2019). Adapun tahapan pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi adalah proses merangkum dan memilah data-data pokok yang telah dipertimbangkan sebagai data penting. Proses reduksi diperlukan dalam penelitian ini karena mengingat data yang diperoleh dari proses pengumpulan data cukup banyak dan beragam. Peran dari reduksi data dari penelitian ini adalah untuk mencapai fokus penelitian dan membuat penelitian ini lebih terarah. Dalam prosesnya setiap data yang direduksi selalu diarahkan kepada pisau analisis yang tengah digunakan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada bagian tahap penyajian data, data-data yang telah direduksi kemudian disusun sehingga menjadi satu narasi yang berujung pada analisis penarikan kesimpulan. Pada model analisis data Miles dan Huberman, penyajian data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif disarankan berupa teks naratif, grafik, matriks, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. (Sugiyono 2019) Adapun

tujuan dari dilakukannya *display* data adalah untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang tengah dilakukan. Adapun bentuk dari penyajian data dari penelitian ini yakni dengan melampirkan hasil wawancara berupa kutipan-kutipan langsung yang peneliti peroleh dari narasumber.

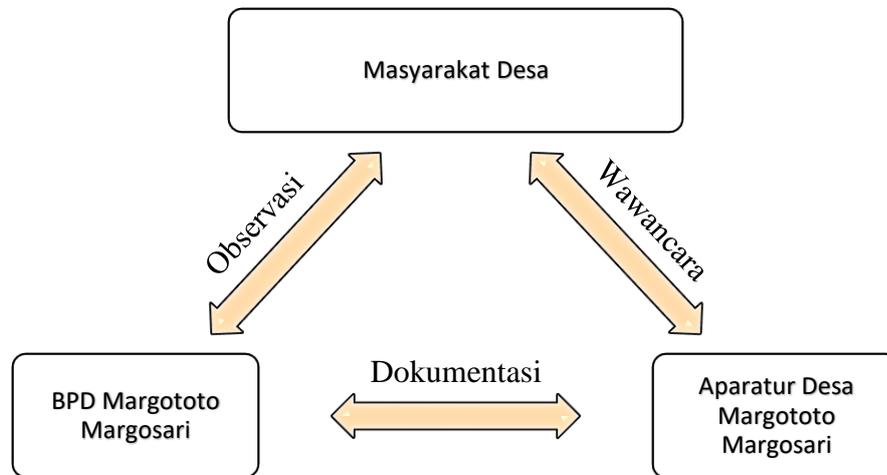
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dapat dikatakan sebagai langkah terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman. Hasil kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan yang masih orisinal yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa penjelasan deskripsi terkait dengan objek yang sebelumnya masih dianggap abu-abu, hubungan dari sebab akibat, interaktif dan yang terakhir teori. Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan kemudian dianalisis menggunakan teori yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah serta untuk memenuhi tujuan penelitian ini. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

3.9 Teknik Validasi Data

Dalam proses penelitian, teknik keabsahan data diperlukan sebagai upaya untuk mengevaluasi data yang telah diperoleh dalam penelitian kualitatif. Tujuan dari adanya proses validitas atau keabsahan data adalah untuk memastikan jika data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dapat secara akurat menggambarkan fenomena yang tengah dikaji. Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam proses validitas data. Akan tetapi, *triangulasi* dipilih sebagai alat untuk meninjau keabsahan data yang diterapkan dalam penelitian ini. *Triangulasi* sendiri dalam pengujian kredibilitas data dimaknai

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono 2019).



Gambar 14. Teknik Validasi Data Sumber dan Teknik

Pada prosesnya *triangulasi* sumber dan teknik dalam penelitian ini berfungsi untuk memperhitungkan seberapa jauh kebenaran data dalam penelitian. Tahapan dilakukan setelah proses pengumpulan data, maka data yang diperoleh dari beberapa sumber informan yang berbeda yang dideskripsikan kemudian di kategorisasi. Kategorisasi tersebut meliputi pengelompokan dalam persamaan, perbedaan dari pandangan dan pengalaman yang telah dilalui dari beberapa informan tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis yang kemudian menghasilkan kesimpulan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diterangkan pada bab sebelumnya, simpulan penelitian Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Margototo dan Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur), adalah sebagai berikut:

Penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Margototo dan Desa Margosari belum optimal dalam mewujudkan akuntabilitas dan pengelolaan optimal yang diatur PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, hal ini disebabkan karena dalam penerapannya di desa, aplikasi tersebut memiliki keterbatasan hanya dapat menjalankan fungsi pencatatan keuangan sehingga indikator yang terpenuhi berkaitan dengan pencatatan dan ketertiban seperti; integritas keuangan, ketaatan, dan asas tertib. Sedangkan indikator lainnya; pengungkapan, transparansi, partisipatif, akuntabel, serta disiplin anggaran, belum berjalan optimal.

Ketidakoptimalan aplikasi SISKEUDES tersebut dikarenakan penerapan aplikasi belum mampu menciptakan saluran-saluran komunikasi (website, papan mading dan sebagainya) yang optimal dalam membuka ruang informasi keuangan desa kepada masyarakat desa setempat. Hal ini berimbas pada minimnya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa di lokasi penelitian ini. Minimnya keterbukaan informasi juga berdampak pada aspek akuntabel di mana pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab pengawasan

setempat oleh masyarakat desa sulit diwujudkan imbas dari kurangnya saluran atau media informasi keuangan sehingga masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan partisipatif atas pengelolaan dana desa. Sedangkan dari aspek disiplin anggaran pun penerapan aplikasi ini belum menjamin bahwa penggunaan dana desa akan sesuai dengan yang dianggarkan. Dan tak kalah penting sebaik apapun sistem tetap sangat bergantung pada SDM yang mengoperasikannya sehingga keoptimalan dari aplikasi ini sangat banyak tergantung dari kualitas integritas dan kejujuran para aparatur desa setempatnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi SISKEUDES bagi aparatur desa serta peningkatan terhadap integritas sumber daya manusia aparatur desa. Aparatur desa harus memiliki kompetensi dan kejujuran tinggi karena mereka adalah otak di balik pengoperasian aplikasi SISKEUDES.
2. Untuk mengoptimalkan SISKEUDES, disarankan agar pemerintah desa mengembangkan mekanisme efektif untuk menginformasikan laporan keuangan kepada masyarakat, seperti melalui papan pengumuman desa, situs web resmi desa, atau aplikasi mobile. Idealnya, informasi dari SISKEUDES terhubung secara real-time dengan situs web desa yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. Melakukan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa. Ini akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- “APLIKASI SISKEUDES - PENDAMPINGDESA.” 2022.
<https://pendampingdesa.com/aplikasi-siskeudes/>. Diakses pada 12 Juni 2023.
- Dihni, Vika Azkiya. 2023. “Dana Desa Memacu Pembangunan, Tapi Rawan Dikorupsi - Analisis Data Katadata.” *katadata.com*.
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/642b0f363c2a0/dana-desa-memacu-pembangunan-tapi-rawan-dikorupsi>. Diakses pada 26 Oktober 2023.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah : Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: Rmbooks.
- Faizah, Alqi, and Retno Sari. 2022. “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5(1): 763–76.
- Fauzanto, Adi. 2020. “Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3(1): 43–52.
- Halim, Abdul, and Dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. 4th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press.
- Juardi, Muhammad Sapril Sardi, Mustakaim Muchlis, and Reski Amalia Putri. 2018. “Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* IV(1): 84–107.

- Kemenkeu, Kementerian Keuangan. 2023. *Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Rincian-DAK-Nonfisik-TA-2023.pdf>. Diakses pada 04 Oktober 2023.
- “Keunggulan Dan Kelebihan Aplikasi Siskeudes 2.0 - Info Desa.” <https://risehtunong.blogspot.com/2018/12/keunggulan-dan-kelebihan-aplikasi.html> Diakses pada 12 Juni 2023.
- Listivaniputri, Azishanindya, and Indrawati Yuhertiana. 2022. “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Yang Di Survei KPK Tahun 2018).” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9(6): 1965–75.
- Maharani, Dinda Novyasari, and Fajar Syaiful Akbar. 2020. “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa.” *Behavioral Accounting Journal* 3(1): 1–20.
- Mardiasmo. 2006. “Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansisektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.” *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2(1): 1–17.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurrizkiana, Baiq, Lilik Handayani, and Erna Widiastuty. 2017. “Determinan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders.” *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 18(1): 28–47.
- Pradana, Yudha. 2024. “Korupsi Dana Desa Di Provinsi Lampung Tahun 2017-2022.” *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/yudha-pradana-1634278296876061167/korupsi-dana-desa-di-provinsi-lampung-tahun-2017-2022-1z2y41IOhwJ>. Diakses pada 03 Agu. 2024.
- Putra, Chandra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, and Suwondo. 2012. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1(6): 1203–12.

- Raba, Manggaukang. 2020. *AKUNTABILITAS KONSEP DAN IMPLEMENTASI*. Malang: UMMPRESS.
- Ridwan, Muhammad Anur. 2019. "Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Ekonomi Syariah* 6(3): 198.
- Rifai, Zelza Rachma Nur Alifah Maulana, and Lina Aryani. 2022. "Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Desa Mekarmulya Kabupaten Karawang Studi Kasus: Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat." 8(September): 612–22.
- Sholeh, Chabib, and Heru Rochansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung:Fokusmedia.<http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/182>. Diakses pada 13 Oktober 2023
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, Dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Tawallo, Rinaldi, Harry Yulianto, and HM Ihsan Baso. 2021. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Prov. Sul-Sel)." *MACAKKA* 02(01): 383–90.